

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut berbagai macam, mulai dari jabatan eksekutif, legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu secara teknis merupakan fasilitas aktivitas penerapan aktivitas rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Indonesia bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai ajang kontestasi penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif). Kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Sehingga pemilu yang diselenggarakan tidak jauh dari masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. [Haris (2006: 10)]

Pemilu 2024 bukan sekedar menghasilkan legitimasi presiden terpilih, tapi presiden terpilih mampu meletakkan reformasi sistem pemerintahan lebih monumental. Tata kelola birokrasi dan pemerintahan, masih menjadi persoalan dalam upaya mencegah korupsi dan kemiskinan.

Pengawasan tahapan Pemilu 2024 ditingkat kecamatan sampai ke tingkat desa (gampong) menentukan pemerintahan yang terbentuk nantinya berpihak kepada rakyat. diharapkan mampu memberikan pengawasan terbaik, agar pemilu nanti menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”. Sedangkan kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang tertentu saja.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Berbicara pemilu tentu tidak terlepas dari elektabilitas, tentu ini penting dan sangat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kontestasi politik, semakin tinggi elektabilitas sebuah partai maka semakin mudah untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Elektabilitas adalah istilah yang digunakan dalam konteks politik untuk menggambarkan kemampuan seorang kandidat atau partai politik untuk menarik dukungan dari pemilih dalam sebuah pemilihan. Istilah ini mengacu pada tingkat popularitas dan daya tarik kandidat atau partai politik di mata pemilih. Sebuah

kandidat atau partai politik yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan.

Esensi dari elektabilitas adalah tentang bagaimana suatu kandidat atau partai politik dapat memengaruhi pemilih dan membuat mereka tertarik pada visi dan program politik yang ditawarkan. Dalam hal ini, elektabilitas mencakup berbagai faktor seperti karakteristik pribadi kandidat, rekam jejak politik, isu-isu yang ditekankan dalam kampanye, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemilih secara efektif.

Fungsi dari elektabilitas adalah untuk memprediksi hasil pemilihan dan untuk membantu kandidat atau partai politik dalam merancang strategi kampanye mereka. Sebuah kandidat atau partai politik yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dapat lebih mudah menarik dukungan dari partai politik, kelompok masyarakat, dan individu yang ingin memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, elektabilitas menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah kampanye politik.

Berangkat dari pada pemilu tentu tidak lepas dari peran partai politik, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional, partai politik secara umum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan atas dasar persatuan, visi, misi dan cita-cita untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Partai politik yang baik salah satunya adalah mampu menjaga dan mempertanggung jawabkan elektabilitasnya dihadapan publik. Sukses atau tidaknya sebuah partai adalah tergantung dari strategi dan upaya apa saja yang ditempuh oleh anggota partai berdasarkan arahan dari pemimpin partai politik.

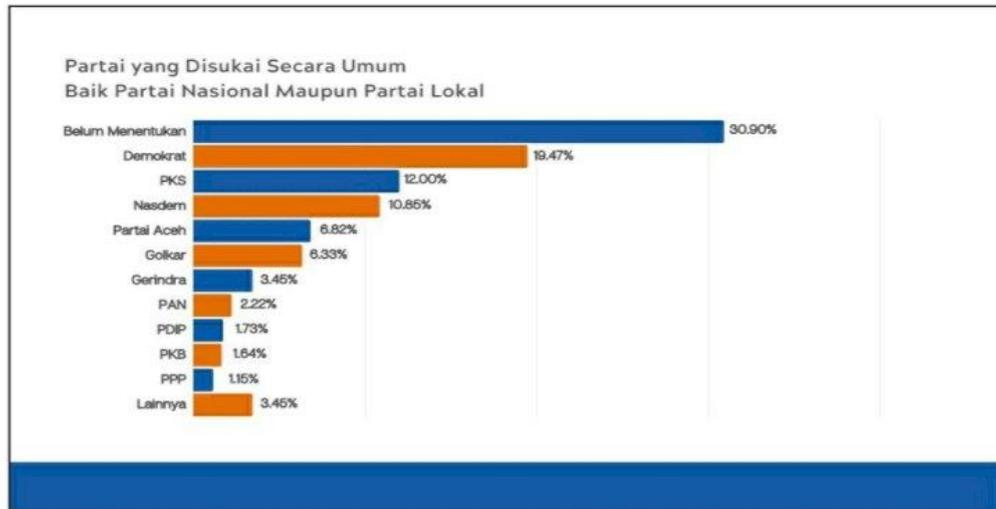
Partai politik memiliki struktur organisasi sesuai dengan keahlian dibidang masing masing dan berkerja sama sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan oleh pemimpin partai baik ditingkat nasional, daerah maupun tingkat cabang kabupaten, sehingga ada keseragaman kepemimpinan atas dasar visi-misi sebuah partai politik.

Saat ini PDI-P ada sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, tentu mempunyai kekuatan politik lebih dari pada partai penguasa rata-rata lainnya. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan mereka dalam memenangkan kontestasi politik pada dua pemilu terakhir yaitu tahun 2014 dan 2019, lalu bagaimana dengan 2024 mungkin atau tidaknya pada pemilu yang akan datang tentu tak lepas dari elektabilitas yang menjadi pertimbangan dasar.

Terlepas dari fenomena diatas. Sebagaimana partai Penguasa dengan elektabilitas tertinggi ditingkat Nasional PDI-P tentu berharap dapat memenangkan lagi pemilu 2024 yang akan datang.

Meskipun PDI-P menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi ditingkat Nasional, elektabilitas PDI-P di Aceh adalah salah satu yang terendah, dibuktikan dengan hasil survei yang oleh lembaga survei E-Trust, PDI-P menduduki urutan ke 8 dengan hasil hanya 1,73%. Hal ini tentu berdampak pada pemilu 2024 mendatang.

Gambar 1. 1 hasil survei E-Trust terhadap elektabilitas Parpol di Aceh



Sumber: rmlaceh.id/ [Survei E-Trust: Elektabilitas Partai Demokrat Tertinggi di Aceh, Disusul PKS dan NasDem - RMOLACEH.ID](#)

Menarik apabila dilihat dari fenomena yang terjadi di Aceh saat ini, bagaimana merosotnya elektabilitas partai *banteng merah* saat ini di Aceh. Hal ini sebanding dengan tidak maksimalnya kepengurusan DPD dan DPC PDIP yang ada di Aceh saat ini. Ditambah lagi dengan isu yang dibangun oleh PDI-P.

Dewan Pengurus Cabang Partai PDI-P di kota lhokseumawe dalam setiap pemilu turut serta dalam memenangkan para calon kader partai kandidat dikota Lhokseumawe. Sebagaimana partai lainnya pada pemilihan umum. Partai PDI-P selalu ikut bertarung dalam pemilihan jumlah suara dari Partai PDI-P di Aceh ditahun 2019 mencapai 4,35% lebih unggul dari beberapa partai nasional yang ada di Aceh.

Persaingan antar partai memaksakan untuk menghadirkan strategi dengan inovasi baru, salah satunya mungkin dengan menggait kaum remaja dan pemuda millenial turut serta, dan dengan merujuk pada Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan."

Menjadi salah satu yang wajib dijalankan karena perintah Undang-Undang terlepas strategi seperti apa yang nantinya diupayakan. Mungkin dengan mengupayakan mencari calon legislatif perempuan berbakat dari kalangan millenial salah satunya juga bisa menjadi salah satu alternatif yang sangat mungkin, demi meningkatkan elektabilitas partai PDI-P DPC Kota Lhokseumawe ditengah maraknya partai lokal dan dikelilingi partai nasional lainnya, ini bisa menjadi peluang untuk itu. Tentu dibutuhkan manuver yang lihai dalam hal ini melihat sangat jauh tertinggal jika dilihat dari perolehan suara.

Tabel 1. 1 perolehan suara partai politik Provinsi Aceh 2019

1	Partai Demokrat	16,13
2	Gerindra	14,7
3	Partai Golkar	12,42
4	PAN	12,42
5	PPP	8,41
6	PKS	8,16
7	PKB	7,27
8	Nasdem	6,91
9	PDIP	4,35
10	PBB	2,59
11	Partai Berkarya	2,58
12	PSI	1,13
13	Hanura	1
14	Perindo	0,71
15	Partai Garuda	0,61
16	PKPI	0,33

Sumber: databoks.

PDI Perjuangan menduduki urutan ke 9 dengan perolehan suara hanya sebesar 4,35% dan ini menunjukkan rendahnya elektabilitas PDI-P tentu ini menjadi persoalan dan tantangan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, khususnya PDI-P Kota Lhokseumawe.

Maka diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan elektabilitas partai PDI-P dikota Lhokseumawe untuk bertarung dan menang dalam pemilihan umum

di 2024. Oleh karena fenomena tersebut peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dengan meneliti tentang **“Strategi Peningkatan Elektabilitas PDI-P dalam menyongsong kemenangan pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah

1. Strategi apa saja yang dilakukan PDI-P untuk meningkatkan elektabilitas partainya dalam menghadapi pemilu 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PDI-P dalam meningkatkan elektabilitas untuk menyongsong pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang ditempuh untuk meningkatkan elektabilitas PDI-P di Kota Lhokseumawe dalam menghadapi pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi PDI-P Kota Lhokseumawe dan solusi dari setiap yang adal dilapangan.

1.4 Fokus Penelitian

1. Upaya PDI-P dalam mengambil langkah strategi peningkatan elektabilitas di Kota Lhokseumawe
2. Kendala yang dihadapi PDI-P dalam pemilihan Umum 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan praktik dilapangan yang terjadi di lingkungan politik praktis dan juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menganalisis sebuah masalah dengan berfikir sistematis. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya sebagai landasan teoritis untuk dijadikan sebagai landasan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi serta informasi tambahan dan masukan agar dapat meningkatkan elektabilitas partai dalam mewujudkan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.